



AKSI SIMPATIK GLOBAL CLIMATE STRIKE BANDUNG

Aktivis yang tergabung dalam koalisi aksi Global Climate Strike melakukan aksi simpatik berjalan kaki untuk iklim di Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/9). Aksi simpatik tersebut merupakan upaya dan ajakan kepada masyarakat serta generasi muda dalam memperjuangkan perubahan nyata mengatasi perubahan iklim.

Puluhan Ketua RT dan RW di Pandeglang Serentak Mengundurkan Diri

Pengunduran diri massal ketua RT dan RW itu terjadi lantaran Kepala Desa dinilai tertutup terhadap kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD. Di setiap ada kegiatan APBN dan APBD tidak diberitahu atau tidak ada musyawarah dengan RT RW.

PANDEGLANG (IM) - Puluhan ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten serentak mengundurkan diri dari jabatan mereka.

Pengunduran diri massal ketua RT dan RW itu terjadi lantaran Kepala Desa Sidamukti, Karsidi dinilai tertutup terhadap kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD.

"Di setiap ada kegiatan APBN dan APBD tidak diberitahu atau tidak ada musyawarah dengan RT RW. Sedangkan, bupati pernah berpesan bilamana ada kegiatan apa pun di desa, RT dan RW wajib untuk mengawal dan wajib untuk mengetahui," kata Ketua Forum RT RW

Desa Sidamukti, Iang, Jumat (15/9).

Iang mengatakan, terdapat 26 ketua RT dan RW di Desa Sidamukti yang menyerahkan surat pengunduran diri kepada kepala Desa Sidamukti. Ditegaskan, pengunduran diri puluhan RT dan RW ini tidak memiliki unsur kepentingan apa pun. Para RT dan RW hanya berupaya mewujudkan asas kejujuran dan transparansi dalam proses pembangunan di Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang.

Puluhan ketua RT dan RW ini juga menyebutkan, balai Desa Sidamukti tidak pernah transparan dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang bersumber dari pemerintah pusat mau-

pun dari Pemkab Pandeglang. Kondisi tersebut membuat para ketua RT dan RW terbebani dan menimbulkan gejala di tengah masyarakat.

"Tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun. Jadi hati nurani masing-masing. Alhamdulillah kami saat ini sudah resmi mengundurkan diri dari RT RW Desa Sidamukti yang berjumlah 26 orang. Kami menyerahkan surat pengunduran diri dan menyerahkan SK," tukasnya.

Sementara itu, Kepala

Desa Sidamukti, Karsidi mengatakan, pengunduran diri puluhan RT RW ini terjadi lantaran miskomunikasi. Karsidi berharap puluhan ketua RT dan RW ini mencabut keputusan pengunduran diri tersebut dan kembali beraktivitas membantu pemerintah untuk mencapai pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat.

"Itu sebenarnya cuma miskomunikasi saya dengan para RT dan RW. Kita sudah ngobrol santai tentang

apa yang menjadi keluhan para RT dan RW. Semua sudah saya jawab sesuai dengan apa yang mereka tanyakan. Kami berharap sebenarnya RT dan RW ini nanti berpikir dengan kepala dingin dan saya juga tidak buru-buru mengambil keputusan walaupun mereka mengundurkan diri. Siapa tahu beberapa hari kemudian mereka datang lagi kepada saya dan bisa bersama-sama lagi," kata Karsidi. ● pra

Kabupaten Lebak Bukan Lagi yang Terbanyak Menerima Kucuran Dana dari Pemerintah Pusat

SERANG (IM) - Dana dari Pemerintah Pusat melalui APBN ke Provinsi Banten tahun ini menurun.

Dari sembilan Pemerintah Daerah di Banten, yang menerima paling banyak kucuran itu bukan Kabupaten Lebak, melainkan Kota Serang.

Berdasarkan data dari Laporan Perekonomian Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, pagu APBN di Provinsi Banten lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Pagu APBN yang dialokasikan untuk wilayah Banten pada tahun 2023 sebesar Rp 15,72 triliun, lebih rendah -7,01 persen (yoy) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 16,91 Triliun.

Secara spasial, alokasi APBN tertinggi terdapat di Kota Serang dengan pagu sebesar Rp 3,1 triliun. Sedangkan, terendah di Kota Cilegon dengan pagu sebesar Rp 495,07 miliar. Berdasarkan data dari

Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Pemprov Banten tahun ini mendapat Rp 2,73 triliun, Kabupaten Lebak Rp 1,28 triliun, Kabupaten Pandeglang Rp 1,4 triliun, Kabupaten Serang Rp 1,56 triliun, Kabupaten Tangerang Rp 2,58 triliun, Kota Tangerang Rp 1,78 triliun, dan Kota Tangerang Selatan Rp 781,5 miliar.

Daerah yang mengalami peningkatan pagu yaitu Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Pada triwulan II 2023, anggaran APBN telah direalisasikan sebesar 22,6 persen atau mencapai Rp 3,55 triliun, lebih rendah dari triwulan II tahun 2022 sebesar 25,2 persen.

Realisasi APBN tertinggi yaitu Kabupaten Tangerang (27,2 persen) atau sebesar Rp 703,57 miliar, diikuti Kabupaten Lebak (26,3 persen) atau sebesar Rp 337,82 miliar, dan Kabupaten Pandeglang (25% persen) atau sebesar Rp 350,68 miliar.

Berdasarkan jenis belanja, pagu tertinggi di Provinsi Banten terdapat pada DAK Non Fisik (BOS) sebesar Rp 4,42 triliun, lebih sedikit -0,2 persen dari triwulan II tahun 2022 sebesar Rp 4,43 triliun.

Sedangkan, pagu terendah yaitu Belanja Bansos yang hanya sebesar Rp 16,67 miliar pada triwulan II tahun 2023, meningkat 21,7 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 13,7 miliar.

Sementara, dari sisi realisasi APBN per jenis belanja, realisasi tertinggi terdapat pada komponen Belanja Bansos yang terrealisasi sebesar 33,89 persen atau Rp 5,64 miliar, diikuti dengan komponen Dana Desa sebesar 33,67 persen atau Rp 442,74 miliar, dan Belanja Pegawai sebesar 31,87 persen atau senilai Rp 1,16 triliun.

Sedangkan, realisasi terendah yaitu pada komponen DAK Fisik yang sebesar 10,56 persen atau sebesar Rp 63,19 miliar. ● pra



VAKSINASI RABIES DAN STERIL KUCING GRATIS DI SEMARANG

Dokter hewan memeriksa seekor anjing peliharaan milik warga sebelum disuntikkan vaksin rabies dalam kegiatan peringatan World Rabies Day 2023 di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/9). Kegiatan vaskinasi rabies dan steril kucing gratis yang digelar Pemerintah Kota Semarang tersebut sebagai upaya melindungi hewan kucing dan anjing dari penyakit rabies serta mencegah over populasi kucing liar.

Libatkan BRIN, Balai Latihan Kerja Serpong Bakal Dikembangkan

SERANG (IM) - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten berencana untuk mengembangkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) Serpong di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan master plan pengembangan BLK itu. Bahkan, penyusunan master plan ini dilakukan dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Kita sudah membuat master plan pengembangan BLK kedepan, masterplan ini kita susun bersama dengan BRIN. Kita ingin BLK ini bisa maksimal dalam menyiapkan tenaga kerja yang profesional," kata Septo, Jumat (15/9).

Septo menuturkan, saat ini master plan yang sudah terpenuhi ialah pemenuhan gedung jahit. Gedung itu akan dilakukan pemugaran melihat usia gedung itu yang sudah tua.

"Termasuk peralatan, peralatan jahit di BLK itu canggih di tahun 1990-an. Tapi sekarang sudah keultra zaman," ucapnya.

Ia mengatakan, peralatan jahit nantinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini, seperti alat jahit tiga jarum yang saat ini tengah digunakan oleh industri sepatu.

"Kita ingin para lulusan BLK dapat menjadi tenaga kerja profesional yang dapat langsung terserap ke dunia kerja. Maka tentu kita pun perlu menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini," pungkasnya. ● pra

Labkesda Cek Sampel Air Limbah di Seluruh Puskesmas Tangerang

TANGERANG (IM) - Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang, Banten, akan memeriksa air limbah di seluruh puskesmas sebagai bentuk menjamin kualitas lingkungan hidup dan tak adanya pencemaran di sekitar lingkungan.

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang, dr. Luluk Sri Adarini di Tangerang, Jumat (15/9), mengatakan pemeriksaan limbah di seluruh puskesmas dilakukan secara bertahap.

Misalnya, saja pada Kamis (14/9), dilakukan pemeriksaan air limbah di Puskesmas Gebang Raya dan Puskesmas Gembor. Sampel air limbah yang sudah diambil, akan diteliti selama 15 hari ke depan.

"Usai dilakukan penelitian, Laboratorium Kesehatan Daerah akan mempresentasikan hasil pengujian untuk menentukan tingkat kontaminasi dan

memahami dampaknya terhadap lingkungan sekitar," ujar dr. Luluk dalam keterangannya.

Ia menambahkan pengambilan sampel air limbah dilakukan sebagai upaya proteksi untuk menjaga lingkungan hidup di kawasan sekitar puskesmas tersebut.

Sesuai dengan parameter pengujian yang biasanya dilakukan, sampel air limbah yang diambil akan diuji berdasarkan kadar COD, BOD, pH, ammonia, minyak dan lemak, total padatan terlarut, dan total coliform. "Kita lakukan pengujian sesuai dengan parameter pemeriksaan yang telah ditentukan," katanya.

Selain itu, Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang juga membuka layanan pemeriksaan air limbah bagi Rumah Sakit, pabrik, atau badan usaha di Kota Tangerang. ● pp

Jika Terbukti Beroperasi, Pemkot Serang Ancam Tutup Tempat Hiburan Malam

SERANG (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Provinsi Serang akan melakukan penutupan tempat hiburan malam (THM) jika memang terbukti kembali beroperasi setelah sebelumnya dilakukan pembongkaran.

Wali Kota Serang, Syafrudin di Serang, Banten (15/9), Jumat, mengatakan, atas adanya laporan dari masyarakat bahwa THM yang telah dibongkar beberapa waktu lalu kini beroperasi kembali akan segera ditinjau oleh Pemkot Serang dalam waktu dekat ini.

"THM yang diketahui beroperasi kembali, maka dalam waktu dekat ini kita akan tinjau ke lokasi," katanya.

Ia mengatakan akan melakukan penutupan THM secara bertahap sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

"Akan kita lakukan penutupan secara bertahap dengan peringkat dulu sesuai dengan prosedur, jika masih membandel maka akan dilakukan penutupan," katanya.

Sementara itu, Ketua RW

05, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Yayat mengatakan ada empat titik THM yang mulai beroperasi kembali dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

"Ada empat THM yang muncul kembali dan ini tidak memiliki izin sama sekali diketahui sudah beroperasi selama satu bulan dan ketika ditegur, justru mengancam dan menantang masyarakat sekitar," katanya.

Maka dari itu, masyarakat berharap agar THM yang kembali beroperasi ini segera ditindak tegas oleh Pemkot Serang agar tidak mengganggu kenyamanan warga.

"Kami berharap laporan ini segera di tindak lanjuti, karena sangat meresahkan warga sekitar," katanya.

Selengkapnya Pemkot Serang telah melakukan pembongkaran lima bangunan THM di Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, pada Kamis 13 April 2023 lalu dengan menggunakan satu alat berat. ● pra

TPP PEGAWAI TERANCAM TAK CAIR LAGI

Pemkot Serang Proyeksikan APBD 2024 Defisit

SERANG (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang kembali proyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2024 menjadi defisit.

Selengkapnya, pada APBD Tahun 2023 juga Pemkot Serang memproyeksikan dengan model defisit senilai Rp 130 miliar dan sempat dipersoalkan oleh DPRD Kota Serang.

Diketahui, proyeksi APBD dengan model defisit tersebut lantaran ada selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

Pada APBD 2024, proyeksi pendapatan daerah hanya mencapai Rp 1,311 triliun, sementara untuk belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,398 triliun. Dari hasil tersebut, ditemukan defisit sekitar Rp 87 miliar.

Ada beberapa konsekuensi yang nantinya harus dijalankan, apabila Pemkot Serang kembali melakukan model defisit kembali di APBD 2024.

Salah satunya adalah gagal cair atau penundaan tambahan penghasilan pegawai (TPP) seperti yang terjadi pada APBD

perubahan 2023, BPKAD menunda TPP hingga awal tahun depan. Pasalnya, APBD Perubahan 2023 akan difokuskan untuk menutupi defisit anggaran sekitar Rp 130 miliar.

"APBD 2024 diproyeksikan, pendapatan daerah 1,3 triliun, belanja daerah Rp 1,398 triliun. Ini defisit menurun dari tahun kemarin (APBD 2023) Rp 130 miliar. Kalau tahun ini defisitnya Rp 87 miliar," ujar Wali Kota Serang, Syafrudin, usai penyampaian Raperda APBD 2024 di Gedung DPRD Kota Serang, Kamis (15/9).

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Imam Rana Hardiana mengatakan, Pemkot Serang masih mempunyai visi misi Walikota dan Wakil Wali Kota Serang yang harus diselesaikan.

"Setiap penyusunan anggaran, kita itu ada mandatori yang diminta oleh Pemerintah Pusat. Kemudian kita juga punya visi misi yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah," katanya. ● pra